

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya¹
A.A.N.B. Dwirandra²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: nak_resman@yahoo.co.id / telp. +62 81 916 778 168

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah yang meningkat diduga tidak serta merta akan meningkatkan belanja modal melainkan bersifat kontingen, yaitu salah satunya, tergantung kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2006-2011 sebagai sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu dengan sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Kata kunci: *belanja modal, PAD, pertumbuhan ekonomi*

ABSTRACT

Increased regional real revenue that allegedly does not necessarily increase capital expenditure, but one of them, depending on regional economic growth. This research aimed to investigate the effect of regional real revenue on capital expenditures to economic growth as the moderating variable. This research was conducted at the district/city in the province of Bali. This research used the realization of budget reports and PDRB tables from 2006-2011 as the sample. Sampling method that used in this research is non probability sampling. Data collected through non-participant observation methods. The analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the analysis is regional real revenue have a positive and significant impact on capital expenditure, and economic growth has no significant effect on capital expenditure, also a significant economic growth is able to weaken the influence of the regional real revenue and capital expenditure.

Keywords: *capital expenditure, economic growth, revenue*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju

pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Olatunji *et al.* (2009) mengatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pajak. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana *et al.* (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat

membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu (2005) yang menyatakan bahwa apabila belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian oleh Yovita (2011) yang memperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.

Penerimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang

semakin baik. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai dan keseharian pemerintah daerah. Perbedaan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu seperti pada penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Tuasikal (2008) dengan penelitian Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu. Bedanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan PAD dan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah

akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

Ha.1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja modal

Ha.2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal

Ha.3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada hubungan antara PAD dengan belanja modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui Biro Keuangan dan BPS Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal yang terdapat pada Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali serta pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi non partisipan.

Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh suatu daerah.

Belanja modal diprosikan melalui jumlah seluruh belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset lainnya yang dilakukan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun (Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 2008:65).

Populasi penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Tabel Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2006–2011. Metode penentuan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 2006-2011.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Sebelum model regresi digunakan, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Variasi data terdistribusi normal apabila *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari signifikan 0,05 yang digunakan dalam penelitian ini. Variasi data dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Variasi data tidak mengandung gejala autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson (DW) berada antara nilai d_U dan $4-d_U$ yang merupakan daerah bebas autokorelasi. Variasi data dinyatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas apabila nilai *absolute residual* lebih besar dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup 9 wilayah di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan periode 2006 hingga 2011. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 9

kabupaten/kota x 6 tahun = 54 amatan. Hasil pengujian asumsi klasik pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	54
Kolmogorov-Smirnov Z	0,854
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,460

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa *Asymp. Sig.(2-tailed)* yaitu $0,460 > 0,05$, ini berarti variasi data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	0,437	2,289
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	0,437	2,289

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) masing-masing sebesar 0,437 dan 2,289. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10, ini berarti data dalam penelitian ini bebas gejala multikolinearitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,764

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 3, nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh sebesar 1,764. Nilai d_U untuk jumlah sampel 54 dengan dua variabel bebas adalah 1,595 sehingga nilai $4-d_U$ adalah sebesar 2,405. Nilai DW sebesar 1,764 berada diantara nilai d_U dan $4-d_U$ yang

merupakan daerah bebas autokorelasi. Hal ini berarti data penelitian tidak mengandung gejala autokorelasi.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
PAD (X_1)	0,297
PDRB (X_2)	0,151
Interaksi (X_1X_2)	0,114

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 4 menunjukkan nilai Sig. untuk masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05, jadi data tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil pengujian statistik deskriptif (dalam jutaan rupiah) menunjukkan nilai maksimum pendapatan asli daerah sebesar 1.406.298 dan nilai minimum sebesar 9.413,11, dengan nilai rata-rata sebesar 157.789,5 dan standar deviasi sebesar 268.176,58. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai maksimum sebesar 6.280.211 dan nilai minimum sebesar 905.544,94, dengan nilai rata-rata sebesar 2.753.729 dan standar deviasi sebesar 1.586.083,94. Belanja modal memiliki nilai maksimum sebesar 445.014,33 dan nilai minimum sebesar 34.665,38, dengan nilai rata-rata sebesar 99.298,53 dan standar deviasi yaitu 64.333,60.

Uji kesesuaian model digunakan untuk menguji apakah model dalam penelitian ini layak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 5.
Hasil Uji Kesesuaian Model

Model	F	Sig.
1 Regression	25,759	0,000
Residual		
Total		

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 5 menunjukkan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi bisa digunakan untuk memprediksi belanja modal atau variabel PAD, pertumbuhan ekonomi, dan pemoderasi secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya.

Tabel 6.
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,607	0,584

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 6 menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,584 yang memiliki arti bahwa 58,4% perubahan variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dan pemoderasi, sedangkan sisanya sebesar 41,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Regresi dengan melakukan uji interaksi antarvariabel untuk menguji apakah suatu variabel merupakan variabel pemoderasi disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) (Utama, 2009).

Tabel 7.
Hasil Moderated Regression Analysis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	63903,993	13715,839	-	4,659	0,000
PAD (X ₁)	1,020	0,220	4,251	4,639	0,000
PDRB (X ₂)	-0,009	0,006	-0,222	-1,609	0,114
Interaksi (X ₁ X ₂)	-0,0000013	0,000	-3,404	-3,838	0,000
Adjusted R²					0,584
F Hitung					25,759
Sig. F					0,000

Sumber: data diolah, 2013

Persamaan regresi yang didapat dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$BM = 63903,993 + 1,020 \text{ PAD} - 0,009 \text{ PDRB} - 0,00000013 (\text{PAD} * \text{PDRB}) + e \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta 63903,993 memiliki arti apabila PAD dan pertumbuhan ekonomi nilainya nol, maka alokasi belanja modal sebesar 63903,993. Nilai koefisien regresi PAD sebesar 1,020 memiliki arti apabila PAD naik sebesar satu persen, maka pengalokasian belanja modal naik sebesar 1,020 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi PDRB sebesar -0,009 memiliki arti apabila pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB atas dasar harga konstan naik sebesar satu persen, maka pengalokasian belanja modal turun sebesar 0,009 persen. Nilai koefisien regresi PAD*PDRB sebesar -0,00000013 menunjukkan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah negatif, artinya semakin tinggi moderasi pertumbuhan ekonomi, maka pengaruh PAD pada pengalokasian belanja modal menurun.

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka dapat diinterpretasikan pengujian hipotesis pertama ($H_{a.1}$) menunjukkan hasil bahwa variabel PAD memiliki koefisien sebesar 1,020 dan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Hal ini memberikan indikasi kalau alokasi belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Bali ditentukan oleh pendapatan asli daerah yang diperoleh. PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian oleh Tuasikal (2008).

Pengujian hipotesis kedua ($H_{a.2}$) menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar $-0,009$ dan tingkat signifikansi $0,114 > \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Hasil ini mendukung penelitian oleh Adiwiyana (2011), Putro (2010), dan Tuasikal (2008).

Pengujian hipotesis ketiga ($H_{a.3}$) menunjukkan hasil analisis pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal yang diomoderasi oleh pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien $-0,00000013$ dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara pendapatan asli daerah pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal semakin menurun. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan pendapatan asli daerahnya untuk belanja-belanja selain belanja modal seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran

2006-2011, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011 tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak serta pembuatan Peraturan Daerah yang dapat mendukung kegiatan perekonomian di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin untuk alokasi belanja modal karena PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Belanja modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik dan mampu memberikan *income* bagi daerah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan data dengan rentang periode waktu penelitian hingga tahun 2012 karena penulis tidak mendapatkan data tahun 2012 yang disebabkan belum terpublikasinya laporan pertanggungjawaban APBD untuk tahun yang bersangkutan. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti sumber-sumber penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel pemoderasi selain pertumbuhan ekonomi.

REFRENSI

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bappeki Depkeu.
- Adiwiyana, Priya. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Bappeda dan BPS Provinsi Bali. 2008. Produk Domestik Regional Bruto Daerah Tingkat 1 Bali. Denpasar.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences*, pp: 241-254.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4, No. 11, pp: 172-182.
- Olatunji, O.C., O. Asaolu Taiwo and J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*, Vol.3, Issue 3, pp: 54-60.
- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Siliwangi.
- Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rizanda. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Taiwo, Muritala and Taiwo Abayomi. 2011. Government Expenditure and Economic Development. *European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Utama, Suyana. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Sastra Utama.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

